

PENGARUH NILAI APBD, TOTAL ASET, OPINI AUDIT, DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP AUDIT DELAY PEMERINTAH DAERAH DI SUBOSUKOWONOSRATEN

Fajar Hendro Wibowo¹⁾, Endang Purwaningsih²⁾

STIE St. Pignatelli, Surakarta, Jawa Tengah

Email: *fajarahendrow11@gmail.com*

Email: *epurwaningsih18@gmail.com*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh nilai APBD, total aset, opini audit dan latar belakang pendidikan terhadap audit delay. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian ini adalah 38 sampel pemerintah daerah di Subosukowonosraten pada 2011-2016. Penelitian menggunakan purposive sampling selama periode penelitian. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa nilai APBD berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, total aset dan latar belakang pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap audit delay dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Nilai Adjusted R Square dari model penelitian ini adalah 0,416. Ini menunjukkan bahwa penundaan audit yang terjadi pada pemerintah daerah di Subosukowonosraten pada 2011-2016 dapat dijelaskan oleh variabel independen (APBD, ASSET, OA, BACK) sebesar 41,6%. Sedangkan sisanya 58,4% (100% - 41,6%) dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model yang diteliti.

Kata Kunci: nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, latar belakang pendidikan, keterlambatan audit

Abstract : *This study aims to provide empirical evidence of the influence of APBD value, total assets, audit opinion and educational background on audit delay. The number of samples that meet the criteria of this study are 38 samples of local governments in Subosukowonosraten in 2011-2016. Research uses purpose sampling during the study period. Data were analyzed using multiple linear regression analysis methods. Based on the test results concluded that the APBD value has a significant positive effect on audit delay, total assets and educational background has a significant negative effect on audit delay and audit opinion has no effect on audit delay. Adjusted R Square value of this research model is 0.416. This shows that the audit delay that occurs in the local government in Subosukowonosraten in 2011-2016 can be explained by independent variables (APBD, ASSET, OA, BACK) of 41.6%. While the remaining 58.4% (100% -41.6%) is influenced by variables or other factors outside the model under study.*

Keywords: APBD value, Total Assets, audit opinion, educational background, audit delay

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah masih tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Keterlambatan pelaporan keuangan telah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal itu telah berlangsung pada kurun waktu yang lama. Ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Pemberlakuan undang-undang tentang akuntansi pemerintah yang ada ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya terkait dengan ketepatanwaktuan. Hal ini terbukti pada hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Jumlah Keterlambatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2011-2016

No	Tahun	Jumlah pemerintah daerah yang mengumpulkan LKPD	Jumlah keterlambatan	Persentase yang terlambat (%)
1	2011	520	94	18,1%
2	2012	524	108	20,6%
3	2013	524	68	12,9%
4	2014	539	35	6,5%
5	2015	542	9	1,6%
6	2016	542	5	0,9%

Sumber : www.bpk.go.id data diolah 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia paling banyak pada tahun 2012 sebesar 108 pemerintah daerah yang terlambat, jumlah keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia paling sedikit pada tahun 2016 sebesar 5 pemerintah daerah yang terlambat, sehingga bisa dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesadaran yang tinggi akan ketepatanwaktuan.

KAJIAN TEORI

Audit Delay

Audit delay adalah rentang waktu antara penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK paling lambat tanggal 31 Maret hingga tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Nilai APBD

APBD adalah daftar yang mempunyai rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Total Aset

Sumber daya yang digunakan entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas disebut aset. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar.

Opini Audit

Opini audit adalah auditor memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen (BPK).

Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan adalah keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan pendidikan yang dimilikinya sebagai dasar untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang ingin disampaikan.

Perumusan Hipotesis

a. Nilai APBD

Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti membuat hipotesis:

H1 : Nilai APBD berpengaruh positif terhadap audit delay.

b. Total Aset

Total aset yang besar dan kompleks akan membutuhkan pengelolaan aset yang baik sehingga pengungkapan lebih besar diperlukan terkait pemeliharaan dan pengelolaan aset. Penelitian Okfitasari (2016) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap pelaporan keuangan, penelitian Siregar (2015) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, namun penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Raharjo (2014) ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti membuat hipotesis:

H2 : Total aset berpengaruh negatif terhadap audit delay.

c. Opini Audit

Opini auditor yang didapat semakin baik menunjukkan tidak banyaknya salah saji dalam laporan keuangan maka akan lebih cepat dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga penyampaian laporan keuangan menjadi tepat waktu. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti membuat hipotesis:

H3 : Opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay.

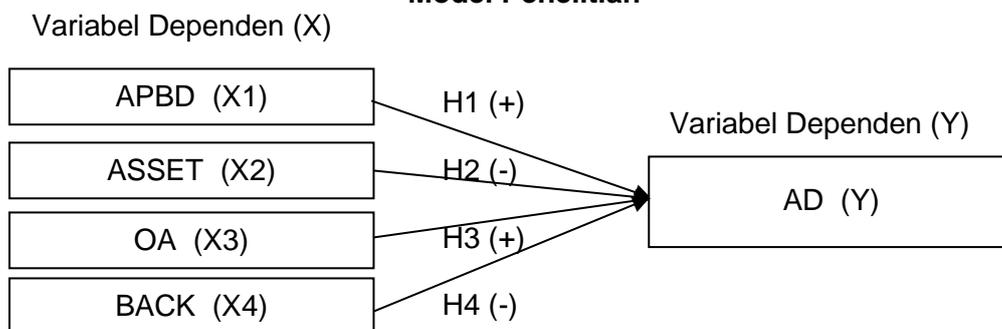
d. Latar Belakang Pendidikan

Pengelolaan keuangan daerah yang baik maka sebaiknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi yang memiliki pengalaman dibidang keuangan diharapkan mampu menyelesaikan tugas penyusunan laporan keuangan dengan tepat waktu. Erniza (2012) menemukan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag* pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Frasti *et al* (2016) menemukan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Jaya dan Megawati (2016) menemukan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap *timeliness*. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti membuat hipotesis:

H4: Latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap audit delay.

Model Penelitian

**Gambar 1
Model Penelitian**



Sumber : Data diolah, 2018

Keterangan:

APBD : Nilai APBD

ASSET : Total Aset

OA : Opini Audit

BACK : Latar Belakang Pendidikan

AD : *Audit Delay*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan

Klaten) tahun 2011 sampai tahun 2016. Sampel penelitian ini karakteristiknya mewakili kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan kriteria sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- Memiliki data Laporan Realisasi Anggaran di pemerintah daerah Subosukowonosraten tahun 2011-2016.
- Memiliki data laporan opini auditor di pemerintah daerah Subosukowonosraten tahun 2011-2016.
- Memiliki data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Subosukowonosraten.

Instrumen Penelitian

Audit Delay

Audit delay adalah rentang waktu antara penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK paling lambat tanggal 31 Maret hingga tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perhitungan *audit delay* dilakukan secara kuantitatif dimulainya tanggal 31 Maret hingga tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Nilai APBD

APBD adalah daftar rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nilai APBD dalam penelitian ini menggunakan pengukuran logaritma natural dari total pendapatan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.

$APBD = \ln \text{ Total pendapatan}$

Sumber: Siregar (2015)

Total Aset

Total aset yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran log natural dari total aset berdasarkan penelitian khasanah dan Rahardjo (2014). Total aset didapatkan dari neraca laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

$ASSET = \ln \text{ Total Aset}$

Sumber: Khasanah dan Rahardjo (2014)

Opini Audit

Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*. Daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) diberi nilai 1, sedangkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*qualified*) diberi nilai 0.

Sumber: Hardini dan Sukirman (2016)

Latar Belakang Pendidikan

Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*. Kepala SKPD yang berlatar belakang pendidikan ekonomilebih banyak dari kepala SKPD yang latar belakang pendidikan nonekonomidiberi nilai 1, sedangkan Kepala SKPD yang berlatar belakang pendidikan ekonomi lebih sedikit dari kepala SKPD yang latar belakang pendidikan nonekonomi nilai 0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APBD	38	27,65	28,45	28,0747	,23264
ASSET	38	27,91	29,67	28,7858	,48725
OA	38	0	1	,58	,500
BACK	38	0	1	,42	,500
AD	38	3	60	38,84	17,174
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Output SPSS 2016

Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan secara ringkas informasi dari data sampel mengenai variabel nilai APBD, total aset, opini audit, dan latar belakang pendidikan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12,39797529
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,100
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 2016

Hasil tabel 3 diatas menunjukkan tingkat signifikan antara variabel dependen dan independen. Normalitas data ditunjukkan dengan Asymp. Sig. (2-tailed) dengan angka sebesar 0,200 >0,05. Dengan demikian, variabel independen dan dependen tersebut terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Pengujian Autokorelasi
Runs Test

		Unstandardized Residual
Test Value ^a		1,31539
Cases < Test Value		19
Cases >= Test Value		19
Total Cases		38
Number of Runs		20
Z		,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a. Median

Sumber: Output SPSS 2016

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan metode Runtest, diperoleh signifikansi sebesar 1,000. Hal ini membuktikan bahwa metode dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena tingkat signifikansi diatas 0,05.

c. Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	APBD	,784	1,276
	ASSET	,772	1,296
	OA	,507	1,971
	BACK	,493	2,030

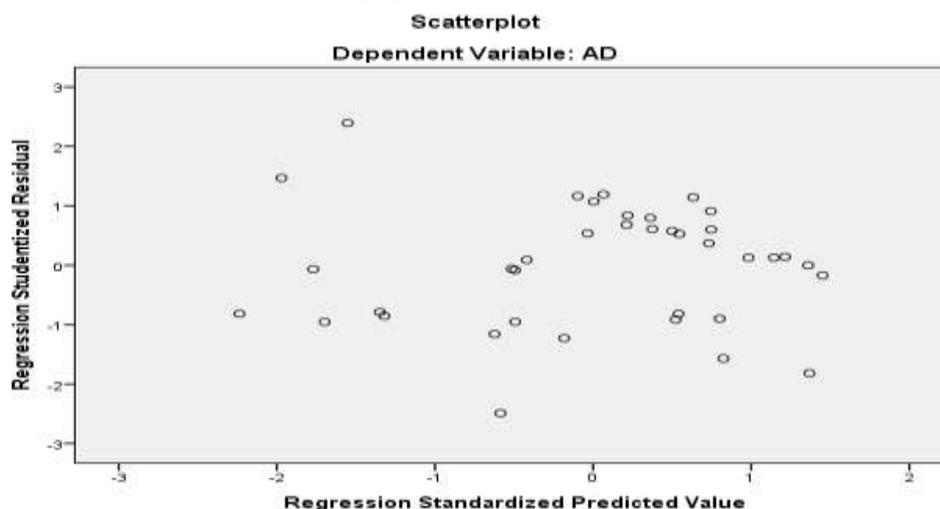
a. Dependent Variable: AD

Sumber: Output SPSS 2016

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa semua nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai tolerance diatas angka 0,10. Maka penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastiditas

Gambar 2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 2016

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu dan pola titik menyebar. Hal ini menunjukkan model dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6
Uji Goodness Of Fit
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,692 ^a	,479	,416	13,128

a. Predictors: (Constant), BACK, APBD, ASSET, OA

b. Dependent Variable: AD

Sumber: Output SPSS 2016

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* model penelitian ini sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan bahwa *audit delay* yang terjadi pada pemerintah daerah di Subosukowonosraten tahun 2011-2016 dapat dijelaskan oleh variabel independen (APBD, ASSET, OA, BACK) sebesar 41,6%. Sedangkan sisanya sebesar 58,4% (100%-41,6%) dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model yang diteliti.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7
Uji Simultan (Uji F)

ANANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5225,790	4	1306,448	7,581	,000 ^b
	Residual	5687,262	33	172,341		
	Total	10913,053	37			

a. Dependent Variable: AD

b. Predictor (Constant), BACK, APBD, ASSET, OA

Sumber: Lampiran, Output SPSS 2016

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 7,581 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Tingkat signifikansi yang menunjukkan dibawah 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis awal (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti APBD, ASSET, OA, dan BACK secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*.

c. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-172,980	295,124			-,586	,562
APBD	21,630	10,480	,293		2,064	,047
ASSET	-13,569	5,042	-,385		-2,691	,011
OA	2,658	6,056	,077		,439	,664
BACK	-15,139	6,146	-,441		-2,463	,019

a. Dependent Variable: AD

Sumber: Output SPSS 2016

Berdasarkan tabel 8 diketahui satu variabel yang memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dan 3 variabel yang memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4. Analisis dan Pembahasan

Tabel 9
Ringkasan Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Hipotesis Penelitian	Hasil Pengujian Hipotesis	Kesimpulan
H ₁ : Nilai APBD berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i>	H ₀ ditolak dan H ₁ diterima	Nilai APBD berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Audit Delay</i>
H ₂ : Total Aset berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>	H ₀ ditolak dan H ₂ diterima	Total Aset berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Audit Delay</i>
H ₃ : Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i>	H ₀ diterima dan H ₃ ditolak	Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
H ₄ : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>	H ₀ ditolak dan H ₄ diterima	Latar Belakang Pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Audit Delay</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut ini disampaikan pembahasan hipotesis penelitian ini.

a. Pengaruh nilai APBD terhadap *Audit Delay*

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja yang lebih baik, sehingga akan mengurangi keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Okfitasari (2015) menyatakan bahwa semakin kecil belanja daerah makan semakin mudah dalam melakukan kontrol dan penyusunan pelaporan keuangan. Hal ini menjadi salah satu penyebab belanja daerah dapat mendorong penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan menjadi relevan sehingga mengurangi *audit delay*.

b. Pengaruh Total Aset terhadap *Audit Delay*

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki total asset yang lebih besar maka *audit delay* semakin berkurang. Karena pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. Sehingga total aset yang semakin besar akan meminimalkan terjadinya *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Okfitasari (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah berukuran besar, biasanya memiliki nilai total aset yang besar pula ketika nilai aset besar didukung oleh kontrol yang baik, maka bukti dan pencatatan atas aset tersebut menjadi lebih baik, sehingga penyajian informasi ini mengakibatkan berkurangnya keterlambatan pelaporan keuangan daerah.

c. Pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay*

Pemerintah daerah yang mendapatkan opini dari BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ataupun selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak mempengaruhi dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke BPK. Hal ini disebabkan opini auditor yang dikeluarkan oleh BPK diperoleh dari hasil laporan keuangan yang menunjukkan banyak atau tidaknya salah saji dalam laporan keuangan, bukan karena ketidak tepatawaktuan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Hak penyampaian seutuhnya diserahkan kepada BPK.

d. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Frasti *et al* (2017) menemukan bahwa manajer yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan mendukung pembuatan anggaran yang lebih detail dan teliti, sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan kinerja yang lebih baik. Dalam penelitian ini, kinerja yang lebih baik mengacu pada semakin berkurangnya *audit delay*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Nilai APBD berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai APBD berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Artinya nilai APBD yang diukur dengan tolat pendapatan berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Total aset berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel total aset berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Artinya Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang lebih besar yang didukung dengan kontrol yang baik maka akan mengurangi terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan.
3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian H_0 diterima dan H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Artinya opini auditor yang diberikan oleh BPK pada tahun sebelumnya tidak dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Hal ini disebabkan opini auditor yang dikeluarkan oleh BPK diperoleh dari hasil laporan keuangan yang menunjukkan banyak atau tidaknya salah saji dalam laporan keuangan, bukan karena ketidak tepatwaktuan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Hak penyampaian seutuhnya diserahkan kepada BPK.
4. Latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*, Dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Denita. (2016). *Pengaruh Komposisi DPRD, Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, dan Size Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Di Jawa Tengah Periode 2011 – 2014*.
- Bastian, Indra . 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPF.
- BPK RI. 2014. *Pemeriksaan Laporan Keuangan IHPS II Tahun 2014*. [Online]. Tersedia di: <http://bpk.go.id> [20 Maeret 2018].
- BPK RI. 2015. *Pemeriksaan Laporan Keuangan IHPS II Tahun 2015*. [Online]. Tersedia di: <http://bpk.go.id> [20 Maeret 2018].
- BPK RI. 2016. *Pemeriksaan Laporan Keuangan IHPS II Tahun 2016*. [Online]. Tersedia di: <http://bpk.go.id> [20 Maeret 2018].
- Erniza, Zaitul, Dan Yunilma. 2012. *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Terhadap Audit Report Lag (pada Pemerintah Daerah Kepulauan Sumatera)*, Sumatera: Universitas Bung Hatta.
- Frasti, *et al*. 2017. *Karakteristik Kepala Daerah dan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Surakarta: Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 01, Januari 2017: 21-34.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Hardini dan Sukirman. 2016. *Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Semarang: Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016).

- Khasanah dan Rahardjo. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Semarang: Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014.
- Mahsun, et al. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Martani dan Lestiani. 2012. *Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia*. *Global Review of Accounting and Finance Vol. 3. No. 1. March 2012. 67 – 84*.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Noviyanti dan Kiswanto. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Semarang: Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016).
- Okfitasari, Antini. 2015. *Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah)*. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Vol. 2 Nomor 4 Desember Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.
- Priharjano dan Wardani. 2016. *Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 2, No 1 2018
- Putri, Puji Kurnia. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Rachmawi, Rini dan Fitri. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1), April 2016.
- Siregar, Baldric. 2015 . *Pengaruh Karakteristik Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. JR AK Volume 11 nomor 2: 89-106.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 Tahun 2011 tentang aset.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Soekrisno, Agus. 2012. *Auditing 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Susbiyani et al. 2014. *The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia*. Malang: *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.5, No.10, 2014.
- Whittington, O. Ray dan Kurt Pann 2012. *Principle of Auditing and Other Assurance Service*, 18 th Edition, Mc-Graw- Hill, New York, NY.
- www.bojolalikab.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.karanganyarkab.go.id
- www.klaten.go.id
- www.sragenkab.go.id
- www.sukoharjokab.go.id
- www.surakarta.go.id
- www.wonogirikab.go.id